



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DINAS PARIWISATA

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Marewah Lantai 1&2
Pulau Dompok Seri Darul Makmur - Tanjungpinang
Pos-el : dispar@kepriprov.go.id

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Hasan, S.Sos
NIP : 197711102006041010
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Kepala Dinas Pariwisata Provinsi kepulauan Riau

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau belum menyediakan dan mengumumkan dan menetapkan informasi yang dikuasasi Tahun 2026 dalam Daftar Informasi Publik (DIP) sesuai standar Perki 1 Tahun 2021.
2. Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau belum mencantumkan informasi dikecualikan yang habis jangka waktu pengecualian sebagai informasi terbuka.
3. Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau belum menyediakan dan mengumumkan Informasi Dikecualikan hasil Uji Konsekuensi sesuai standar Perki 1 Tahun 2021.
4. Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau tidak mencantumkan informasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS dikarenakan tidak dipersyaratkan pada dokumen persiapan pengadaan (E-PURCHASING).
5. Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau tidak mencantumkan informasi Rancangan Kontrak dikarenakan tidak dipersyaratkan pada dokumen persiapan pengadaan (E-PURCHASING).
6. Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau tidak mencantumkan informasi Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan dikarenakan tidak dipersyaratkan pada dokumen persiapan pengadaan (E-PURCHASING).
7. Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau tidak mencantumkan informasi Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dikarenakan tidak dipersyaratkan (diperuntukan untuk pekerjaan jasa konsultasi non konstruksi).
8. Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau tidak mencantumkan informasi Dokumen Penawaran Administratif dikarenakan tidak dipersyaratkan pada dokumen persiapan pengadaan (E-PURCHASING).
9. Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau tidak mencantumkan informasi Berita Acara Pemberian Penjelasan dikarenakan tidak dipersyaratkan pada dokumen persiapan pengadaan (E-PURCHASING).
10. Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau tidak mencantumkan informasi Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding dikarenakan tidak dipersyaratkan pada dokumen persiapan pengadaan (E-PURCHASING).

11. Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau tidak mencantumkan informasi Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia dikarenakan tidak dipersyaratkan Berita Acara Penetapan dan Pengumuman Penyedia (melalui platform E-PURCHASING).
12. Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau tidak mencantumkan informasi Laporan Hasil Pemilihan Penyedia dikarenakan tidak dipersyaratkan laporan hasil pemilihan penyedia (melalui platform E-PURCHASING).
13. Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau tidak mencantumkan informasi Surat Perintah Mulai Kerja dikarenakan tidak dipersyaratkan SPMK (pada platform E-katalog & Toko daring dengan surat pesanan (E-purchasing).
14. Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau tidak mencantumkan informasi Surat Jaminan Pelaksanaan dikarenakan tidak dipersyaratkan dipersyaratkan surat jaminan pelaksanaan (pada platform E-katalog & Toko daring dengan surat pesanan (E-purchasing) Pelaksanaan pengadaan E-purchasing dibawah nilai tertentu.
15. Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau tidak mencantumkan informasi Surat Jaminan Uang Muka dikarenakan tidak dipersyaratkan surat jaminan uang muka (pada platform E-katalog & Toko daring dengan surat pesanan (E-purchasing).
16. Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau tidak mencantumkan informasi Surat Jaminan Pemeliharaan dikarenakan tidak dipersyaratkan surat jaminan pemeliharaan (diperuntukan untuk pekerjaan kontruksi).
17. Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau tidak mencantumkan informasi Laporan Pelaksanaan Pekerjaan dikarenakan tidak dipersyaratkan Laporan Pelaksanaan Pekerjaan (diperuntukan untuk pekerjaan kontruksi).
18. Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau tidak mencantumkan informasi Laporan Penyelesaian Pekerjaan dikarenakan tidak dipersyaratkan Laporan Penyelesaian Pekerjaan (diperuntukan untuk pekerjaan kontruksi).
19. Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau tidak mencantumkan informasi Berita Acara Serah Terima Sementara atau Provisional Hand Over dikarenakan tidak dipersyaratkan Berita Acara Serah Terima Sementara atau Provisional Hand Over (diperuntukan untuk pekerjaan kontruksi).
20. Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau belum mencantumkan informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat.
21. Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau belum mencantumkan informasi tentang Informasi Dikecualikan.
22. Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau belum mencantumkan informasi tentang Pengajuan keberatan online (bukan mengunduh formulir pengajuan keberatan).
23. Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau belum memiliki Formulir Permohonan Informasi.
24. Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau belum memiliki Formulir Keberatan.
25. Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau belum memiliki pelayanan informasi public.
26. Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau belum mencantumkan informasi tentang Aksesibilitas Tuna Rungu dan Wicara.

27. Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau belum memiliki Aksesibilitas Tuna Netra.
28. Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau belum memiliki Aksesibilitas penyandang disabilitas Lainnya.
29. Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau belum mencantumkan informasi tentang SOP Uji Konsekuensi.
30. Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau belum mencantumkan informasi tentang SOP Penetapan dan pemutakhiran daftar informasi public.
31. Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau belum menetapkan kebijakan pelayanan informasi public.
32. Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau belum menyediakan anggaran rutin kegiatan keterbukaan informasi.
33. Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau belum menyediakan anggaran bagi peningkatan kapasitas SDM pengelola PPID.
34. Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau belum menyediakan anggaran lain bagi kegiatan lain dalam rangka pelaksanaan pelayanan keterbukaan informasi
35. Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau belum Mengumumkan Informasi berkaitan penggunaan atau realisasi anggaran Tahun 2025
36. Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau belum mengumumkan Informasi berkaitan alasan yang dapat digunakan Pemohon Informasi mengajukan keberatan.
37. Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau belum memiliki aplikasi untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Perangkat Daerah Provinsi.
38. Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau belum memiliki aplikasi yang mendukung atau berkaitan dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Perangkat Daerah Provinsi.
39. Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau belum menyediakan dokumen jawaban PPID atas penolakan permohonan informasi dikarenakan belum pernah melakukan penolakan permohonan informasi.
40. Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau belum pernah menyediakan Dokumen pemberitahuan permohonan perpanjangan waktu karena selama ini dilakukan melalui Komunikasi verbal.
41. Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau belum pernah menangani atau menanggapi Pemohon Informasi mengajukan keberatan.
42. Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau belum pernah menangani atau menanggapi pengajuan keberatan diinternal Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau.
43. Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau belum memiliki atau menjalankan keputusan mediasi dalam sengketa informasi.
44. Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau belum memiliki atau menjalankan keputusan Komisi Informasi yang telah berkekuatan hukum tetap.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Pariwisata
Provinsi kepulauan Riau,



Hasan, S.Sos
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197711102006041010